MANARUKO
Jurnal Pengabdian Masyarakat
https://jmpe.ppj.unp.ac.id/index.php/manaruko/index
Vol.3, No.2, 2024
ISSN (Electronic) : 2986-9048

Pelatihan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Nagari

Nurzi Sebrina[1], Husnil Khatimah[2], Efrizal Syofyan[4], Herlina Helmy[6], Halkadri Fitra[7*]
[1,2,3,4,5]Universitas Negeri Padang
*Corresponding author, halkadri.fitra@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.24036/manaruko.v3i2.41
Diterima: 27-11-2024
Revisi : 08-12-2024
Available Online: 11-12-2024

A B S T R A C T

The training on Planning, Budgeting, Administration, and Financial Reporting of Nagari in Nagari Kamang Hilia, Agam Regency, was attended by 25 participants and aimed to enhance the capacity of Nagari officials to manage village finances efficiently and accountably. This program included an in-depth understanding of the Village Financial System (Siskeudes), which consists of planning, budgeting, implementation, administration, and reporting modules. Additionally, the training emphasized transparent, accountable, participatory, orderly, and disciplined financial management principles. With this training, it is expected that Nagari officials will be able to manage village funds more effectively, in line with applicable regulations, and increase information transparency to the public. This activity also aims to ensure that all Nagari officials have a uniform understanding in carrying out their duties, ultimately improving the quality of village financial management in Nagari Kamang Hilia.

KEYWORD

Pelatihan, Keuangan Nagari, Penganggaran, Pelaporan Kamang Hilia

A B S T R A K

Pelatihan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Nagari di Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam diikuti oleh 25 peserta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan desa yang efisien dan akuntabel. Kegiatan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Selain itu, pelatihan ini menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan aparatur nagari dapat mengelola dana desa dengan lebih baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aparatur nagari memiliki pemahaman yang seragam dalam pelaksanaan tugasnya, dengan hasil akhir meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Kamang Hilia.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Some rights reserved

PENDAHULUAN

Nagari Kamang Hilia merupakan 1 dari 5 nagari (desa) yang berada di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan luas 16,31 km^2 memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 sejumlah 5.540 jiwa(BPS Kab. Agam, 2023). Empat nagari lainnya adalah Nagari Kamang Mudiak, Nagari Magek, Nagari Pauh dan Nagari Kamang Tangah Anam Suku (Bappeda Kab. Agam, 2023). Sebagai sebuah nagari maka aparatur pemerintah nagari menjalankan kegiatan pemerintahan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah RI, 2014). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, maka banyak harapan untuk kemajuan desa. Salah satunya adalah tentang pengelolaan dana desa yang diharapkan mampu untuk menciptakan desa yang sejahtera dan makmur. Dalam rangka pengelolaan yang transparan, akuntabel dan partisipatif maka pemerintah telah mengeluarkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta lebih ditekniskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Kemendagri, 2018).

Kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Seiring dengan bertambahnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat, kemampuan pemerintah nagari untuk merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan anggaran secara tepat sangatlah penting. Tanpa pemahaman yang baik, potensi penyalahgunaan atau inefisiensi penggunaan anggaran dapat terjadi, yang pada akhirnya menghambat pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat (Sebrina et al., 2023; Yap et al., 2024).

Kegiatan ini juga merespons tantangan yang dihadapi oleh pemerintah nagari dalam memahami regulasi keuangan yang terus diperbarui, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) serta pelaporan berbasis aplikasi yang kini menjadi standar. Kurangnya pengetahuan teknis dalam penatausahaan dan pelaporan sering menjadi kendala dalam memenuhi standar akuntabilitas dan keterbukaan. Oleh karena itu, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada perangkat nagari agar lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku (Haris et al., 2024; Sarbunan & Posi, 2021; Suparman, 2019).

Selain itu, pelatihan ini merupakan upaya strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat nagari. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah nagari diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa, merancang program pembangunan yang berdaya guna, serta memastikan pelaporan yang transparan kepada masyarakat dan pihak terkait. Hal ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan nagari, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada (Alana & Perwita Sari, 2023a; Fahrizal & Firmansyah, 2024; Nada & Frinaldi, 2022).

Observasi awal terkait dengan pengelolaan dana desa terutama tentang perencanaan dan penganggaran keuangan dana desa yang merupakan dana yang bersumber dari APBN, dan peruntukannya sudah ditentukan menjadi hal yang sangat krusial, sehingga membuat aparat nagari harus hati-hati. Petunjuk teknis memang sudah ada, namun aparatur nagari sangat membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam tentang perencanaan dan penganganggaran ini. memang sangat dirasakan sangat dibutuhkan pelatihan dan penjelasan tentang penatausahaan dan pelaporan keuangan dana desa ini. Beberapa dokumen penatausahaan dana desa yang belum tersedia dan pelaporan keuangan yang belum sempurna, semakin memperkuat keinginan tim pengabdian untuk memberikan pelatihan perencanaan dan penganggaran keuangan dana desa ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih bersifat baru, namun pihak nagari harus segera mempersiapkan kualitas sumber dayanya untuk menciptakan pengelolaan keuangan dana desa yang baik, handal dan transparan (Alana & Perwita Sari, 2023b, 2023a; Assyahri et al., n.d.).

Berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan, maka beberapa permasalahan mitra terkait dengan pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa (nagari) ini adalah:

1. Pemahaman aparatur nagari tentang sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dana desa (nagari) masih belum merata

2. Sumber daya manusia yang langsung melaksanakan kegiatan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dana desa (nagari) kebanyakan belum sesuai dengan latar belakang keilmuan seperti untuk penyusunan laporan keuangan tidak memiliki latar belakang keilmuan akuntansi.
3. Kegiatan pelatihan tentang sistem sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan masih minim dan jarang dilakukan oleh Instansi vertikal dan bertanggung jawab terhadap pembinaan sistem pengelolaan keuangan dana desa (nagari).

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka solusi yang akan diberikan adalah:

1. Melakukan kegiatan pelatihan terhadap aparatur desa (nagari) terkait dengan teknis sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dana desa.
2. Memberikan pemahaman kepada pejabat teknis penyusunan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dana desa supaya memiliki persepsi yang sama terhadap proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan dana desa (nagari)
3. Bekerja sama dengan instansi vertikal di pemerintahan kabupaten Agam untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyusunan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dana desa (nagari) yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di daerah Kabupaten Agam.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Nagari di Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur nagari dalam tata kelola keuangan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini melibatkan perangkat nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan pihak-pihak terkait yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan ini mencakup materi tentang siklus keuangan nagari, mulai dari perencanaan program, penyusunan anggaran, hingga pembuatan laporan yang sesuai dengan regulasi terkini, seperti penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Kegiatan pelatihan berlangsung selama 1 hari, dengan metode pembelajaran yang interaktif, termasuk ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi praktik. Narasumber dari kalangan praktisi dan ahli keuangan desa diundang untuk memberikan bimbingan teknis dan berbagi pengalaman. Peserta diajak untuk memahami cara menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), melaksanakan penatausahaan keuangan, serta membuat laporan pertanggungjawaban yang komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari.

Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan nagari. Melalui diskusi dan studi kasus, peserta belajar mengidentifikasi potensi permasalahan dan solusi praktis dalam pengelolaan dana desa. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, aparat nagari Kamang Hilia mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, mendukung pembangunan desa, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari dalam memanfaatkan dana publik.

Kegiatan Pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Program

Tahap persiapan pelaksanaan program Pelatihan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Nagari di Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam, dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelatihan. Pemerintah Nagari bersama pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), melakukan evaluasi terhadap kapasitas perangkat nagari dalam mengelola keuangan. Dari evaluasi tersebut, ditentukan materi-materi pelatihan yang relevan, seperti perencanaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, pelaporan keuangan berbasis regulasi, dan penggunaan aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Setelah kebutuhan pelatihan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah penyusunan rencana pelatihan. Pemerintah Nagari menyusun jadwal pelatihan, menetapkan lokasi, dan mengalokasikan anggaran kegiatan. Dalam tahap ini, juga dilakukan koordinasi dengan narasumber atau fasilitator yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan desa. Dokumen pendukung seperti proposal kegiatan, kerangka acuan kerja (TOR), dan daftar peserta juga disiapkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pelatihan.

Tahap persiapan berikutnya adalah sosialisasi program kepada para peserta dan pihak terkait. Pemerintah Nagari memberikan informasi mengenai tujuan, jadwal, dan manfaat pelatihan melalui pertemuan langsung atau media komunikasi lainnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan semua peserta memahami pentingnya kegiatan ini dan siap berpartisipasi secara aktif. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data awal berupa informasi tentang pengalaman dan kemampuan awal peserta untuk menyesuaikan metode pelatihan dengan kebutuhan mereka.

Selanjutnya, tahap pengadaan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dari persiapan. Pemerintah Nagari memastikan fasilitas seperti ruang pelatihan, peralatan presentasi, dan materi pelatihan tersedia sesuai kebutuhan. Pengadaan dilakukan dengan mematuhi prinsip efisiensi dan transparansi. Selain itu, logistik seperti konsumsi, alat tulis, dan sertifikat peserta juga disiapkan sebagai bagian dari dukungan teknis kegiatan.

Tahap terakhir dalam persiapan adalah simulasi dan pengujian teknis. Sebelum pelatihan dilaksanakan, dilakukan uji coba terhadap peralatan dan alur kegiatan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Simulasi ini melibatkan panitia pelaksana dan narasumber, dengan tujuan meminimalkan kendala teknis selama pelaksanaan pelatihan. Dengan persiapan yang matang, program pelatihan diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil maksimal, yakni peningkatan kapasitas aparatur nagari dalam tata kelola keuangan yang akuntabel.

2. Tahap Pelaksanaan Program

Tahap pelaksanaan program Pelatihan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Nagari di Nagari Kamang Hilia dimulai dengan pembukaan resmi kegiatan. Pada sesi ini, perwakilan pemerintah nagari dan pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), memberikan sambutan dan menjelaskan tujuan pelatihan. Pembukaan juga melibatkan penyampaian gambaran umum materi yang akan dibahas selama pelatihan, sehingga peserta memahami pentingnya kegiatan ini dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dan transparan.

Tahap berikutnya adalah penyampaian materi inti, yang dilakukan oleh narasumber berkompeten di bidang pengelolaan keuangan desa. Materi disampaikan secara sistematis, dimulai dari dasar-dasar perencanaan program yang berbasis kebutuhan masyarakat hingga penganggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan nagari. Peserta diajarkan tentang prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), termasuk bagaimana menyelaraskan rencana kegiatan dengan alokasi dana yang tersedia secara efektif.

Sesi berikutnya berfokus pada praktik penatausahaan keuangan, di mana peserta diajarkan bagaimana mencatat dan mengelola transaksi keuangan sesuai regulasi. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menjadi bagian penting dari sesi ini, di mana peserta diberikan pelatihan langsung tentang cara mengoperasikan aplikasi tersebut untuk mempermudah proses administrasi keuangan. Dengan pendekatan praktik langsung, peserta dapat memahami dan menguasai aplikasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Selain penatausahaan, pelatihan ini juga mencakup materi tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Peserta diberikan panduan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan format dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka juga diajarkan bagaimana menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat melalui forum musyawarah nagari, sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan nagari.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan penutupan pelatihan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman dan keterampilan peserta melalui diskusi, simulasi, atau ujian sederhana. Peserta juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan tentang pelaksanaan pelatihan. Pada penutupan, panitia dan narasumber memberikan sertifikat kepada peserta sebagai bukti partisipasi dan menyampaikan harapan agar ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan di nagari. Pelaksanaan yang terstruktur ini diharapkan mampu menciptakan aparatur nagari yang lebih kompeten dalam mengelola keuangan secara profesional.

3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Program

Tahap evaluasi pelaksanaan program Pelatihan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Nagari di Nagari Kamang Hilia dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kapasitas peserta. Proses evaluasi diawali dengan pengumpulan data melalui instrumen seperti kuesioner, wawancara, dan observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Kuesioner disebarkan kepada peserta untuk

mengetahui tingkat pemahaman mereka sebelum dan sesudah pelatihan, serta untuk mendapatkan tanggapan tentang kualitas materi, metode penyampaian, dan narasumber.

Selanjutnya, penilaian dilakukan terhadap ketercapaian tujuan pelatihan, baik dari segi pemahaman teori maupun keterampilan praktis peserta. Hal ini melibatkan pengujian kemampuan peserta dalam menyusun dokumen seperti rencana anggaran, laporan keuangan, dan simulasi pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Narasumber atau fasilitator memberikan umpan balik langsung kepada peserta berdasarkan hasil simulasi tersebut untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada.

Tahap evaluasi juga mencakup diskusi kelompok bersama peserta, narasumber, dan panitia pelatihan. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pengalaman peserta selama pelatihan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mencari solusi untuk implementasi di lapangan. Selain itu, masukan dari peserta digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pelatihan di masa mendatang, sehingga program yang serupa dapat menjadi lebih efektif dan relevan.

Selain evaluasi internal, hasil pelatihan dievaluasi secara eksternal melalui dampaknya terhadap kinerja pemerintah nagari. Dalam beberapa minggu atau bulan setelah pelatihan, dilakukan monitoring untuk melihat sejauh mana peserta menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan nagari. Hal ini melibatkan pengamatan terhadap kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan tingkat keterbukaan pemerintah nagari terhadap masyarakat.

Tahap evaluasi diakhiri dengan penyusunan laporan evaluasi pelatihan yang mencakup semua temuan dan rekomendasi. Laporan ini disusun oleh panitia pelatihan dan diberikan kepada pemerintah nagari serta pihak-pihak terkait sebagai bahan acuan untuk perbaikan di masa depan. Dengan evaluasi yang komprehensif, program pelatihan diharapkan memberikan dampak jangka panjang, terutama dalam menciptakan tata kelola keuangan nagari yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilakukan selama 1 hari pada tanggal 7 Agustus 2024 dimulai dari jam 07.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di kantor wali nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana, kemudian dari Wali Nagari Kamang Hilia dan dibuka secara resmi oleh Camat Kamang Magek. Jumlah peserta berjumlah 25 orang yang merupakan aparatur nagari Kamang Hilia yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Wali Jorong, Badan Musyawarah Nagari, dan lembaga-lembaga yang ada di Kenagarian Kamang Hilia. Suasana kegiatan acara dapat dilihat seperti gambar berikut ini:

Gambar 1. Kegiatan Pembukaan Acara Kegiatan

Narasumber dalam kegiatan ini ada 4 pihak yaitu 1). FM Piliang dari Tim Ahli Perencanaan Infrastruktur dengan topik Perencanaan Kegiatan Infrastruktur Desain & RAB, 2) Eko Purwanto, S.Pd, M.M dari DPMN Kabupaten Agam dengan topik Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Masa Pemulihan Ekonomi Desa, 3)Drs. Welfizar, M.Si, CGCAE dari Inspekrorat Kabupaten Agam dengan topik Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari, dan 4) Prof. Dr. Efrizal Syofyan, M.Si, Ak dari FEB UNP dengan topik Pelaporan Keuangan Nagari. Suasana kegiatan pelatihan pengabdian dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. Suasana Kegiatan Pelatihan

Pemateri 1 tentang *Perencanaan Kegiatan Infrastruktur Desain & RAB* berfokus pada memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam merencanakan proyek infrastruktur secara efektif, mulai dari desain teknis hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berikut adalah poin-poin utama yang dijelaskan dalam materi ini:

1. Konsep Dasar Perencanaan Infrastruktur

Peserta diajarkan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat sebagai dasar dari perencanaan infrastruktur. Tahapan awal perencanaan dimulai dengan identifikasi masalah, pengumpulan data lapangan, dan penentuan prioritas proyek. Dalam hal ini, peserta juga dilatih untuk merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nag) sebagai pedoman utama agar proyek infrastruktur yang direncanakan selaras dengan visi pembangunan nagari.

2. Penyusunan Desain Teknis

Materi ini membahas langkah-langkah membuat desain teknis proyek infrastruktur seperti jalan desa, saluran air, atau fasilitas umum lainnya. Peserta diperkenalkan pada prinsip-prinsip dasar desain yang meliputi fungsi, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, mereka diajarkan cara membaca dan membuat gambar kerja sederhana yang menjadi panduan pelaksanaan proyek. Penggunaan perangkat lunak sederhana untuk mendukung desain juga diperkenalkan, jika memungkinkan.

3. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Peserta dilatih untuk menyusun RAB secara detail dan akurat. Tahapan ini meliputi identifikasi kebutuhan material, tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Materi mengajarkan cara menghitung volume pekerjaan, menentukan harga satuan, serta menyusun total biaya proyek berdasarkan estimasi yang realistis. Penekanan juga diberikan pada pengelolaan anggaran agar sesuai dengan plafon yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag).

4. Penyelarasan dengan Regulasi

Materi ini mencakup penjelasan regulasi yang relevan, seperti standar teknis dan aturan pengadaan barang dan jasa. Peserta diajarkan untuk memastikan bahwa desain dan RAB yang dibuat memenuhi ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah atau kementerian terkait. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi masalah hukum atau administrasi di kemudian hari.

5. Simulasi Penyusunan Desain & RAB

Bagian akhir materi adalah praktik langsung di mana peserta melakukan simulasi perencanaan proyek infrastruktur. Mereka bekerja dalam kelompok untuk merancang desain teknis sederhana, menghitung volume pekerjaan, dan menyusun RAB sesuai dengan kasus nyata di nagari. Simulasi ini bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta sehingga mereka mampu menerapkannya dalam perencanaan proyek di lapangan.

Pemateri 2 dengan topik pengelolaan keuangan dana desa lebih memfokuskan tentang perencanaan, penganggaran dan penatausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur nagari dalam menjalankan tata kelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Berikut adalah poin utama yang dijelaskan dalam pelatihan ini:

1. Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Desa

Materi ini mengawali pelatihan dengan menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Peserta diajak memahami bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa/nagari, dengan tujuan memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Peserta diberikan pemahaman tentang tahapan perencanaan yang diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan nagari (MusrenbangNag). Mereka diajarkan bagaimana menyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag). Penekanan diberikan pada proses prioritisasi kegiatan sesuai plafon anggaran yang tersedia, sehingga anggaran yang disusun realistis dan tidak berlebihan.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Materi ini berfokus pada pengelolaan administrasi keuangan yang tertib, termasuk pencatatan transaksi harian dan penyusunan laporan keuangan bulanan. Peserta dikenalkan pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mempermudah proses penatausahaan keuangan. Selain itu, dijelaskan pula cara pengelolaan kas desa, pengelompokan belanja berdasarkan jenis kegiatan, dan pelaporan realisasi anggaran secara tepat waktu.

Pemateri 3 menyampaikan materi tentang *Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari* dalam Pelatihan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Nagari di Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam, bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta tentang peran penting pembinaan dan pengawasan dalam memastikan tata kelola keuangan nagari yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Berikut adalah poin utama yang dijelaskan:

1. Konsep Pembinaan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari

Materi ini menjelaskan arti penting pembinaan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kapasitas aparatur nagari dalam mengelola keuangan. Peserta diajak memahami bahwa pembinaan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian panduan teknis dari pemerintah daerah, Inspektorat, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan aparatur nagari memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan

Peserta diberikan pemahaman tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah nagari. Hal ini mencakup pendampingan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), penyusunan laporan keuangan, serta penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Selain itu, dijelaskan bahwa pemerintah daerah juga bertugas memfasilitasi solusi jika terjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari.

3. Pengawasan Keuangan Nagari

Materi pengawasan menitikberatkan pada pentingnya pengendalian internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan nagari. Peserta diajarkan tentang mekanisme pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), yang bertindak sebagai lembaga kontrol internal untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, peran pengawasan eksternal oleh Inspektorat, auditor independen, dan masyarakat juga ditekankan dalam rangka meningkatkan transparansi.

4. Identifikasi dan Mitigasi Risiko Keuangan

Peserta dilatih untuk mengenali risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan nagari, seperti kesalahan pencatatan, penyalahgunaan anggaran, atau keterlambatan penyampaian laporan. Materi ini memberikan strategi untuk mengurangi risiko tersebut, seperti pengawasan berkala, audit internal, dan pemanfaatan teknologi untuk meminimalkan kesalahan administrasi.

5. Penyelesaian Permasalahan dan Sanksi

Bagian akhir materi ini menjelaskan bagaimana menangani permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari, termasuk mekanisme pengaduan dan tindak lanjut dari hasil audit. Peserta diajarkan tentang jenis sanksi administratif atau hukum yang dapat diterapkan jika ditemukan pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa pengawasan bukan hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk mencegah masalah dan memperbaiki tata kelola.

.

Pemateri 4 manyampaikan materi tentang **Pelaporan Keuangan Nagari** berfokus pada pengelolaan keuangan nagari yang mencakup **pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan**. Poin-poin penting yang disampaikan pada pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur nagari terkait pengelolaan dana desa agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Materi utama yang dijelaskan meliputi:

1. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Pemakaian aplikasi ini mempermudah pengelolaan keuangan dengan empat hal utama yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan keuangan yang membantu untuk mempercepat dan mengurangi potensi kesalahan pengelolaan dana desa. Aplikasi ini sangat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana nagari
2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan: Materi juga mencakup prinsip transparansi, yang memastikan masyarakat dapat mengakses informasi keuangan desa dengan mudah; akuntabilitas, yang mengharuskan pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan secara jelas; serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan juga ditekankan, memastikan semua kegiatan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada
3. Pentingnya Mempunyai Pemahaman yang Sama: Melalui pelatihan ini memastikan bahwa aparatur nagari memiliki pemahaman yang sama mengenai teknik dan prosedur pengelolaan keuangan, serta dapat mengimplementasikan penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku di Kabupaten Agam

Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengabdian dalam rangka melihat keberhasilan pelaksanaan yang berhubungan dengan pemahaman peserta terhadap materi kegiatan, maka panitia melakukan tes kepada peserta sebelum dan sesudah penyampaian materi oleh narasumber. Kegiatan yang diikuti 25 orang peserta aparat desa ini untuk mengetahui tingkat pemahaman maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Nagari Kamang Hilia, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang pengelolaan keuangan desa sebelum penyampaian materi pendidikan dan pelatihan. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest). Adapun hasil evaluasi awal disajikan pada tabel satu berikut ini:

Tabel 1. Hasil Pretest Peserta

Nilai	Jumlah Peserta (orang)	Presentase
<55	5	20.00%
55 - 80	13	52.00%
>80	7	28.00%
Jumlah	25	100.00%

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil pretest peserta sebanyak 5 peserta atau 20,00% masih di bawah nilai 55, sedangkan 13 peserta atau 52,00% berada pada nilai 55 sampai 80 dan 7 peserta atau 28,00% dengan nilai di atas 80. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini memang membutuhkan pengetahuan untuk peningkatan kapasitas tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan (postest), yang dituangkan pada Tabel 2. Melihat hasil pada Tabel 2 dapat simpulkan bahwa hasil postest menunjukkan tidak ada peserta yang mmeiliki nilai dibawah nilai <55, sedangkan 8 peserta atau 32,00% berada pada nilai 55 sampai 80, dan 17 orang peserta atau 68,00% dengan nilai di atas 80. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini mengalami peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait pengelolaan keuangan

desa. Diharapkan dengan hasil ini pengelolaan keuangan desa di Nagari Kamang Hilia dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2. Hasil Postest Peserta

Nilai	Jumlah Peserta (orang)	Presentase
<55	0	0.00%
55 - 80	8	32.00%
>80	17	68.00%
Jumlah	25	100.00%

Kegiatan pelatihan ditutup secara resmi oleh Wali Nagari Kamang Hilia dan diakhiri dengan sesi foto bersama seperti nampak sebagai berikut:

Gambar 3. Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Adapun keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor berikut ini:

1. Besarnya keinginan aparat pemerintahan Nagari Kamang Hilia untuk mengetahui dan memahami tentang kegiatan pengelolaan keuangan desa yang meliputi dasar hukumnya, siklus pengelolaan serta kekuasaaan pengelolaan keuangan desa dan siklus pengelolaan keuangan desa.
2. Adanya dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat dan tokoh agama, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan dan kemandirian desa.
3. Adanya bantuan tempat kegiatan yang disediakan oleh Wali Nagari, yaitu Aula Pertemuan Kantor Wali Nagari, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan yaitu terkumpulnya aparat pemerintahan desa.
4. Adanya Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Agam dalam hal nampak dengan hadirnya dan diutusnya narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan nagari.
5. Adanya dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan yang didanai dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Negeri Padang.

SIMPULAN

Pelatihan yang diselenggarakan di Nagari Kamang Hilia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan, dengan fokus pada perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Materi pelatihan mencakup penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang membantu dalam penyusunan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Melalui pelatihan ini, aparatur nagari diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik dan seragam mengenai proses pengelolaan keuangan, sehingga dapat mengelola dana desa dengan lebih efisien, sesuai aturan, dan terbuka kepada masyarakat. Pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan dan memastikan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana desa.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan nagari, dan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di Nagari Kamang Hilia

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang (LPPM UNP) atas dukungan dana dan motivasi yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Alana, K., & Perwita Sari, R. (2023a). Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa di Pulau Sumatera Guna Mendorong Keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, *5*(2), 994–1010. https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6194

Alana, K., & Perwita Sari, R. (2023b). Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa di Pulau Sumatera Guna Mendorong Keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, *5*(2), 994–1010. https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6194

Assyahri, W., Vaguita|, M., Kunci, K., Evaluasi, :, Desa, K., Manajemen, I., & Vaguita, M. (n.d.). *EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI NAGARI KAYU TANAM KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM*. https://doi.org/10.35967/jipn

Bappeda Kab. Agam. (2023, February 8). *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kamang Magek*. Https://Bappeda.Agamkab.Go.Id/View-Berita/Musyawarah-Perencanaan-Pembangunan-Kecamatan-Kamang-Magek.Html.

BPS Kab. Agam. (2023). *Kecamatan Kamang Magek Dalam Angka 2023*.

Fahrizal, A., & Firmansyah, A. (2024). Pelaksanaan Program Green Village Dengan Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Tujuan Berkelanjutan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, *4*(4).

Haris, U., Kontu, F., Syahruddin, S., Oja, H., Sari, K., & Rachmawati, D. (2024). Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Wasur Distrik Merauke melalui Pendidikan dan Pelatihan Capacity Building of Village Apparatus in Village Fund Management in Wasur Village Merauke District through Education and Training. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, *3*, 34–41. https://doi.org/10.57214/pengabmas.v6i3.563

Nada, W. P., & Frinaldi, A. (2022). Analisis Pemanfataan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Publicness Journal of Public Administration Studies*, *1*(1), 60–67. https://doi.org/ttps://doi.org/10.24036/publicness.v1i1.14

Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38582/Uu-No-6-Tahun-2014.

Yap, N., Laely, N., Triwidyati, E., Agustina, E., & Prihardini, O. W. (2024). Village Financial Management Training Based on the Siskeudes Application to Increase Accountability of Village Funds. *ARSY :Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, *5*(1), 65–73. http://journal.al-matani.com/index.php/arsy,Online

Kemendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/139714/Permendagri-No-20-Tahun-2018*.

Sarbunan, A. E., & Posi, S. H. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa,Pendidikan Dan Kualitas Pelatihan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Trust Riset Akuntansi*, *8*(2), 83–93. https://doi.org/https://doi.org/10.33387/jtrans.v8i2.4230

Sebrina, N., Helmy, H., Mesta, H. A., Fitra, H., & Triani, M. (2023). Peningkatan Kapasitas Pemahaman Aparatur Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam tentang Penatausahan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa. *Manaruko: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 85–92. https://doi.org/10.24036/manaruko.v2i2.21

Suparman, H. (2019). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(2), 135–149.

.